

**Guru yang Belajar - Murid yang Mengajar :
Melepas Belunggu Dominasi dalam Pembelajaran***

Ariefa Efianingrum

Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP UNY

Abstract

The significant issue when educating adults is perceived distance between teacher and student. A domination approach in adult education makes dominator. But there are many adults educators that find new way of thinking about learning. As a teacher of adults, educators don't just learn to teach, but must learn to listen too. One basic assumption in all this is that adult learning is best achieved in dialogue. The approach to adult learning based on these principles holds that adults have enough life experience to be in dialogue with any teacher about any subject and will learn new knowledge, attitudes, or skills best in relation to that life experience. The power of dialogue in the classroom was needed and that work to make dialogue education more effective in practice. All of the principles and practices are indeed means to close that gap and develop that dialogue.

A. Pendahuluan

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang semakin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara kita hidup dan bertindak. Pendidikan adalah kekuatan masa depan karena merupakan alat perubahan yang sangat ampuh (Morin, 2005 : 9). Dalam perkembangan ke depan, dunia pendidikan kita dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat. Pada satu sisi, hingga saat ini kualitas pendidikan kita masih terlihat carut-marut. Pada sisi yang lain, pendidikan juga dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pendidikan global.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi informasi membawa pengaruh pada perubahan di bidang pendidikan. Bentuk dan peranan lembaga pendidikan juga mengalami perubahan karena proses belajar serta tempat atau pusat-pusat belajar juga semakin beraneka ragam. Peran para pelaku dalam pendidikan juga dituntut untuk berubah, dalam konteks persekolahan misalnya, dari seorang guru yang "menggurui", "digugu", "ditiru" menjadi seorang motivator dan fasilitator bagi peserta didik ke arah pribadi yang mandiri. Hal tersebut berimplikasi pada adanya campur tangan dan intervensi yang semakin minim dari seorang guru (Kurniawan, 2005). Akan tetapi guru semakin dituntut untuk membuka peluang-peluang bagi terciptanya kondisi kebebasan agar peserta didik dapat mengadakan pilihannya sendiri.

Salah satu upaya untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan pada era informasi adalah dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Proses pembelajaran yang selama ini berlangsung di masing-masing lembaga harus ditata dan dibuka pintunya bagi teknologi pembelajaran modern. Teknologi ini jika ditangani secara profesional akan membangkitkan motivasi mahasiswa serta membuka kesempatan untuk komunikasi dialogis antara dosen dengan mahasiswa, dan antarmahasiswa. Namun, dalam kenyataannya, komponen teknologi ini terkesan terbengkalai dan berjalan terseok-seok dibandingkan dengan komponen lainnya. Selain persoalan teknologi pembelajaran, masih banyak lagi persoalan menyangkut proses pembelajaran di kelas.

Masalah-masalah tersebut menyangkut pendidikan yang transformatif, khususnya bagi orang dewasa antara lain meliputi : Bagaimana proses pembelajaran yang membebaskan ? Bagaimana menjadi guru yang membebaskan ? Bagaimana guru mengajarkan bahan ajar dengan metode dialogis ? Sebagian guru mengakui bahwa mengajar itu sangat menuntut (*demanding*), sekaligus merupakan aktivitas yang sangat khusus, kendati segala yang berlangsung di kelas merupakan pucuk gunung es (*the tip of iceberg*). Guru biasanya lebih menyenangi aspek praktik daripada teori (Shor, 2001:3). Padahal setiap praktik selalu didasari oleh teori, demikian juga sebaliknya.

Paulo Freire (Shor, 2001:140), membedakan antara pendidikan yang tradisional dan pendidikan yang membebaskan. Kurikulum resmi selalu mengulahi siswa tentang demokrasi, namun tidak pernah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mempraktikannya. Mestinya, praktik demokrasi perlu disituasikan di dalam batas pengembangan siswa. Keterarahan dan kebebasan harus diletakkan sebagai hal baru di dalam masing-masing kelas. Bukannya tetap melanggengkan dominasi guru atas siswa.

B. Mengandaikan Interaksi Guru dan Murid yang Ideal

Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan hendaknya meningkatkan kualitas kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam

menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya (Heryanto, 2002).

Dalam pendidikan, anak didik adalah subjek yang bersifat unik yang mencapai kedewasaan secara bertahap (Suparno et. al, 2002:25). Masing-masing anak didik memiliki kekhususan tersendiri, memiliki kemampuan yang tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada anak didik yang persis sama satu dengan lainnya. Anak didik hendaknya diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Memperlakukan anak didik sebagai objek dan menggeneralisasikan mereka merupakan perlakuan yang tidak tepat. Pendidikan semacam itu membonsai anak didik sebagai manusia muda yang seharusnya memiliki kemampuan dan kebebasan berkembang. Anak didik sebaiknya dibimbing dan didampingi agar dapat berkembang dan mengembangkan diri sendiri.

Dengan begitu, subjek didik bertanggungjawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Subjek didik memiliki potensi, baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda sehingga masing-masing subjek didik merupakan insan yang unik. Subjek didik membutuhkan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Subjek didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya.

Guru merupakan agen pembaharuan. Guru berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Guru sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar. Guru bertanggungjawab atas tercapainya hasil belajar subjek didik. Guru dituntut untuk menjadi contoh dalam pengelolaan proses belajar-mengajar bagi calon guru yang menjadi subjek didiknya. Guru bertanggungjawab secara profesional untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya. Selain itu, guru hendaknya menjunjung tinggi kode etik profesional.

Peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan media/teknologi pendidikan yang tepat. Program belajar mengajar dirancang dan diimplikasikan sebagai suatu sistem. Proses dan produk belajar perlu memperoleh perhatian seimbang di dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Materi pengajaran dan sistem penyampaiannya mestinya selalu berkembang. Dari semua

itu, yang perlu diwujudkan adalah terciptanya kondisi yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa dalam atmosfer akademik yang menyenangkan.

Seperti diungkapkan oleh Paulo Freire (Shor, 2001:140), dalam sebuah kelas yang membebaskan, secara bertahap guru menarik diri dari posisi direktur pelatihan menjadi pengarah kekuatan. Ketika diskusi berkembang semakin berhasil mengundang inisiatif kritis, guru harus mendorong kemampuan swaorganisasi (*self organization*), serta partisipasi mereka dalam menyusun agenda kurikulum. Sasaran dari swaorganisasi pada kelas yang membebaskan adalah sangat menarik. Guru dapat mendorong otoritas untuk menghentikan dominasinya.

Kini tampak mengemuka pentingnya teologi politik pendidikan yang mampu membebaskan kaum marginal dari "ketertindasan" (Shor, 2001:142). Konstruksi sosial yang kurang adil dan memberikan peluang terhadap tumbuhnya eksklusivitas pendidikan bagi kaum kaya harus dihilangkan. Sementara, etos komunalitas yang mengusung empati atas sesama manusia dan kebersamaan dalam membangun pilar-pilar pendidikan yang berkeadilan sosial harus menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, universalitas pendidikan yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat difungsikan sebagai upaya memperkecil celah disparitas pendidikan yang merugikan kaum marjinal.

Jika pendidikan dipahami sebagai aksi kultural untuk pembebasan, maka pendidikan tidak bisa dibatasi fungsinya hanya sebatas area pembelajaran di sekolah. Ia harus diperluas perannya dalam menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis (Shor, 2001:141). Untuk itu dalam pandangan Freire, harus ada semacam kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Pelajaran yang bisa ditarik dari Freire untuk konteks pendidikan kita paling tidak adalah komitmennya terhadap kaum marjinal. Jika kita memakai perspektif Freirean, kunci utama agar kelompok marjinal bisa menjadi subjek yang otonom dan bisa mengkritisi realitas eksistensialnya adalah dengan cara mengembangkan kesadaran kritisnya dan mentransformasi struktur sosial yang tidak adil. Kaum marjinal harus diyakinkan bahwa mereka berhak dan mampu menentukan nasib sendiri, berhak mendapatkan keadilan dan melawan segala bentuk diskriminasi.

C. Potret Interaksi Guru dan Murid yang Dominatif

Selama ini siswa masih disubordinasikan hanya sebagai pemikul beban pembiayaan sekolah. Sekolah umumnya memfokuskan perhatian pada masalah keaktifan dan kelancaran siswa dalam membayar iuran, sumbangan dan pungutan. Sepertinya siswa diposisikan sebagai pesakitan, yang sebelum memperoleh pelayanan pendidikan harus memberikan uang terlebih dahulu. Demikian juga dalam konteks kelas. Di dalam kelas, siswa seringkali masih diperlakukan sebagai obyek pengajaran yang selalu pasif. Harus diakui, dominasi guru di dalam kelas masih terasa sehingga yang terjadi bukan proses pembelajaran, melainkan proses pengajaran. Kelas, dengan demikian, tak ubahnya seperti menempatkan guru sebagai pembicara tunggal, yang segala perkataannya harus didengarkan.

Menurut Paulo Freire (<http://unlamview.com/?p=6>) sistem pembelajaran yang dominatif memiliki ciri: (a) guru mengajar, siswa belajar, (b) guru tahu segalanya, siswa dianggap tidak tahu apa-apa, (c) guru berpikir, siswa dipikirkan, (d) guru berbicara, siswa mendengarkan, (e) guru mengatur, siswa diatur, (f) guru memilih dan memaksakan pilihannya, siswa menuruti, (g) guru bertindak, siswa membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya, (h) guru memilih apa yang diajarkan, siswa menyesuaikan diri, (i) guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalnya, dan (j) guru adalah subjek proses belajar, siswa objeknya.

Masih menurut Freire, sebagian besar, guru mengajar dengan cara ceramah. Di kolese (Shor, 2001 : 150), biasanya seorang profesor secara tradisional berceramah di hadapan sejumlah besar siswa, yang duduk di dalam ruang besar sambil mencatat, terkantuk-kantuk, mengerjakan pekerjaan rumah untuk mata pelajaran lain, atau sambil ngobrol satu dengan lainnya. Seolah-olah tidak ada kontak personal di antara pendidik dengan peserta didik.

Biarpun telah banyak gagasan yang menganjurkan perlunya pemberdayaan siswa, dominasi guru di kelastetap saja masih terjadi. Tanpa sadar guru telah menjadi penjaga *status quo* atas peranan tradisionalnya itu. Akhirnya guru akan cenderung konservatif dalam menafsir tugasnya, sekaligus menjadi orang yang sulit berubah. Apa yang diungkapkan oleh Prof. Suyanto di dalam Kompas (16 Februari 2001) mungkin dapat menjadi bahan perenungan, bahwa begitu guru masuk dan menutup pintu kelas maka

"merah-biru"-nya wajah pembelajaran akan ditentukan oleh guru. Bila guru profesional maka dinamika kelas akan terbangun. Sebaliknya, bila guru itu tidak profesional, maka kelas seperti kuburan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penyadaran dan pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran. Seharusnya guru menyadari bahwa begitu guru masuk kelas dan menutup pintu, sesungguhnya di hadapannya telah bersiaga empat puluh pasang tangan, mata dan telinga yang siap mencatat segala gerak-gerik guru. Dalam konteks kedudukan siswa sebagai anggota Komite Sekolah, sesungguhnya siswa siap melaporkan "jalannya" proses pembelajaran di kelas itu.

Hasil laporan itu akan sangat bermanfaat bagi Komite Sekolah maupun kepala sekolah guna mengetahui kinerja setiap guru. Siswa akan dapat menilai apakah layanan pendidikan yang diterimanya sudah sepadan dengan biaya yang telah dibayarkan kepada sekolah. Bila sekolah menarik biaya cukup tinggi, menurut hukum pasar, maka layanan pendidikan harus diberikan dalam takaran kualitas yang juga cukup tinggi. Hal tersebut berguna sebagai sarana penyadaran bagi guru untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran. Justru karena kepala sekolah relatif kurang intensif dalam memonitor kinerja guru di dalam kelas, peranan siswa menjadi amat penting.

Merujuk instrumen "Monitoring & Evaluasi"-sebuah instrumen kebijakan yang mirip dengan instrumen Akreditasi Sekolah (Depdiknas, 2000), kualitas pembelajaran dapat ditandai dengan indikator : (1) apakah guru selalu membawa rencana pembelajaran ke dalam kelas; (2) apakah guru mendidik, mengajar, melatih atau membimbing dengan benar; (3) apakah guru masih suka menyuruh siswa mencatat; (4) apakah guru selalu berada di ruang kelas selama pembelajaran berlangsung dan lain-lain. Keberadaan siswa sebagai "kelompok penekan" di dalam proses pembelajaran bukanlah suatu kemustahilan. Pada kenyataannya, beberapa guru--di tempat kerja penulis--pernah mendapat klaim dari siswa atas buruknya kinerja mereka. Ini harus dijadikan momentum penting bagi perubahan paradigma pembelajaran, yang menempatkan guru dan siswa dalam posisi sama berdayanya.

Sesungguhnya posisi pendidikan menempati area suprastruktur atau bangunan bawah dari struktur ekonomi-politik suatu masyarakat. Pendidikan yang direproduksi oleh masyarakat sangat terkait bahkan nyaris ditentukan oleh perkembangan dan kepentingan-kepentingan struktur dominan terutama negara dan modal (kapitalisme).

Akan tetapi bukankah pihak dominan ini sesungguhnya adalah hasil dari proses perkembangan sejarah masyarakat? Bukankah eksistensi pendidikan memang harus berkembang sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia? Kenapa masih ada kritik wacana tentang netralitas tersebut? (Manshur, 2003).

Eksistensi pendidikan di suatu negara tidaklah mungkin mengingkari proses sejarah. Bahkan lebih dari itu, untuk kepentingan memajukan peserta didik, prosesi pendidikan mau tidak mau harus berjalan sesuai dengan jalur globalisasi. Lalu apa maksud sesungguhnya dari paham strukturalisme yang gencar mengkritik ideologi dominan dalam dunia pendidikan? Sesungguhnya kritik paham strukturalisme (atau lebih tepatnya disebut dengan paham kritis-sosial) tersebut lebih menekankan pada substansi dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Dalam bingkai kehidupan kapitalisme yang saat ini mendominasi dengan ideologi pasarnya, pendidikan seolah-olah hanya sekadar sebagai proses penyesuaian peserta didik untuk masuk dalam arus pasar (industrialisasi) yang berkembang. Akibatnya pendidikan tidak lagi sebagai sarana bebas, otonom dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, pembebasan dll, melainkan hanya mengarah pada kepentingan-kepentingan pragmatis politik-ekonomi tertentu. Bahkan lebih dari itu, moralitas dan nilai-nilai kebajikan yang selama ini menjadi substansi dari dasar pendidikan telah mengalami degradasi digantikan dengan semangat pragmatisme ekonomi dan politik.

Dalam perjalanannya, pendidikan makin dirasakan tidak terbebas dari kepentingan sosial politik dan ekonomi (Wahono, 2001:vii). Bahkan pendidikan lambat laun dirasakan telah digunakan oleh para penguasa demi melanggengkan atau melegitimasi dominasi mereka. Saat itulah muncul kritik bahwa pendidikan sudah tidak netral lagi, melainkan sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti relasi kelas, gender, dan warna kulit ataupun sistem relasi lainnya.

Pendidikan di bawah kendali aparatus ideologi dominan ini pada hakikatnya hanya digunakan demi melanggengkan kekuasaan status quo. Pendidikan tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun sistem relasi lainnya. Dalam konteks pendidikan yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan inilah Freire

kemudian memulai gagasannya secara radikal untuk mengembalikan proses kemanusiaan yang telah hilang. Dengan slogan proses memanusiakan manusia kembali, ia melihat bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses dehumanisasi. Dalam kaitannya dengan ini ia juga melihat ada efek-efek pemikiran (kesadaran) dalam pandangan hidup masyarakat. Freire menggolongkan kesadaran manusia tersebut menjadi tiga; kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naival consciousness*), dan kesadaran kritis (*critical consciousness*).

Kesadaran magis biasanya diyakini oleh masyarakat yang masih tradisional dan kurang memahami ilmu pengetahuan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Sementara kesadaran naif biasanya berkembang dalam masyarakat yang telah mengalami rasionalisasi ilmu pengetahuan namun kurang tepat membaca kebenaran sejati terhadap realitas sosial yang ada. Barangkali kesadaran naif inilah yang kini banyak berkembang dalam masyarakat kapitalisme yang telah mereproduksi sarana pendidikan sebagai bagian dari kepentingan-kepentingan ideologinya. Sementara kesadaran kritis adalah paham yang bisa melihat relasi sosial secara radikal beserta perangkat-perangkat visionernya mengenai pentingnya proses memanusiakan kembali manusia.

Meskipun begitu, ada pandangan lain yang percaya pada hakikat pendidikan sebagai strategi humanisasi. Pendidikan merupakan proses dekonstruksi yang memproduksi wacana tanding, untuk membangkitkan kesadaran kritis kemanusiaan (Wahono, 2001:viii). Pendidikan identik dengan proses pembebasan manusia. Pendirian ini berangkat dari asumsi bahwa manusia telah mengalami proses dehumanisasi dalam sistem dan struktur sosial. Melihat proses perkembangan pendidikan yang selama ini berjalan, semakin dituntut untuk mengevaluasi model pendidikan yang tepat dalam rangka memanusiakan manusia. Bagaimana pun, pihak-pihak dominan telah melakukan penjinakan sehingga mengakibatkan peserta didik hanya sebagai objek kepentingan pragmatis yang akhirnya menjerumuskan masyarakat pada keadaan tidak manusiawi.

D. Komunikasi Dialogis dalam Interaksi Pembelajaran Humanis

Kritik Freire dan Ilich tersebut tidak lahir secara spontan atau sekadar menciptakan klise-klise intelektualisme, melainkan didasarkan pada pemahaman teoritik dan praktik pendidikan selama bertahun-tahun di Amerika Latin. Jika kalangan

pendidikan umumnya melihat dunia pendidikan berpijak dari kerangka wacana semisal positivisme logis, liberalisme, konservatisme, dan anarkisme, keduanya memulai dari paradigma strukturalisme ala Marxisme. Melalui metode strukturalisme, konstruksi lama mengenai pendidikan kemudian dibongkar dan dinyatakan bahwa pendidikan adalah suatu institusi yang berhubungan dan berdialektika dengan struktur ekonomi-politik yang berkembang. Memang, bagi paham ini, bidang politik, sosial, agama, budaya, seni, termasuk pendidikan, eksistensi dan posisinya tidak akan terlepas dari persoalan ekonomi dan kekuasaan yang berdiri mendominasi kehidupan suatu masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, proses yang harus ditempuh harus mengandaikan dua gerakan ganda, yaitu dengan meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus berupaya mentransformasikan struktur sosial yang menjadikan penindasan itu berlangsung. Sebab, kesadaran manusia itu berproses secara dialektis antara diri dan lingkungan. Ia punya potensi untuk berkembang dan mempengaruhi lingkungan, tetapi ia juga bisa dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial atau milieu tempat ia berkembang. Untuk menghadang laju kapitalisasi pendidikan, ada dua pilihan yang dapat dilakukan dalam upaya rekayasa sosial, yaitu dengan strategi kultural dan dengan strategi struktural. Dua strategi tersebut bukanlah suatu yang saling menegasikan dan tidak bersifat oposisi biner, artinya keduanya bisa saling melengkapi.

Tugas utama pendidikan sebenarnya mengantarkan peserta didik menjadi subjek. Idealitas dapat dicapai jika proses pembelajaran mengandaikan relasi antara guru/dosen dan peserta didik yang bersifat subjek-subjek, bukan subjek-objek. Tetapi konsep ini tidak berarti hanya menjadikan guru sebagai fasilitator *an sich*, karena guru harus terlibat (bersama-sama peserta didik) dalam mengkritisi dan memproduksi ilmu pengetahuan. Guru dalam pandangan Freire tidak hanya menjadi tenaga pengajar yang memberi instruksi kepada anak didik, tetapi mereka harus memerankan dirinya sebagai pekerja kultural (*cultural workers*). Mereka harus sadar, pendidikan itu mempunyai dua kekuatan sekaligus, yaitu sebagai aksi kultural untuk pembebasan atas dominasi dan hegemoni, serta sebagai medium untuk memproduksi sistem sosial yang baru atau sebagai medium untuk mereproduksi status quo.

Berikut ini terdapat 12 prinsip yang perlu diperhatikan menuju proses pembelajaran yang efektif (Vella, 2002:4), khususnya untuk orang dewasa, yang merupakan jalan untuk mebiasakan dialog antara guru dengan murid :

1. *Need Assessment: participation of the learners in naming what is to be learned.*
2. *Safety in the environment and the process. We create a context for learning. That context can be made safe.*
3. *Sound relationships between teacher and learner and among learner.*
4. *Sequence of content and reinforcement.*
5. *Praxis : action with reflection or learning by doing.*
6. *Respect for learners as decision makers*
7. *Ideas, feelings, and actions : cognitive, affective, and psychomotor aspects of learning.*
8. *Immediacy of the learning.*
9. *Clear roles and role development.*
10. *Teamwork and use small groups.*
11. *Engagement of the learners in what they are learning.*
12. *Accountability : how do they know they know.*

Dalam konteks proses evaluasi, pembelajaran yang humanis tidak semata-mata bertumpu kepada evaluasi produk, tetapi sangat memperhatikan proses. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan siswa didasarkan kepada beberapa instrumen evaluasi, di antaranya (a) hasil ulangan harian dan ulangan umum, (b) tugas-tugas terstruktur, (c) catatan perilaku harian dalam proses pembelajaran, dan (d) laporan kegiatan. Dengan kata lain, evaluasi yang hanya didasarkan pada produk atau tes akhir (seperti hasil UNAS) bertentangan dengan sistem pembelajaran yang humanis. Sistem evaluasi yang bertumpu pada produk tidak menyemaikan daya kritis dan daya kreatif subjek didik. Sistem itu akan menghasilkan manusia-manusia unggul dalam menalar, tetapi gagap dalam menghadapi tantangan masa depan yang memerlukan daya kritis, kreatif, dan adaptif.

Pendidikan yang dialogis akan dapat menjembatani celah yang ada di antara pendidik dan peserta didik. Dialog tersebut akan menghubungkan kata-kata bacaan (*textual*) dengan kata-kata kenyataan (*contextual*), sehingga keduanya harus saling berbicara. Dialog akan memberikan suara pada realitas siswa, yang mampu mengubah idiom intelektual abstrak yang ada di dalam kelas. Dengan demikian, siswa tidak lagi diposisikan sebagai objek pendengar, melainkan juga sebagai manusia yang terlibat sebagai subjek dalam proses dialog tersebut (sebagai murid yang mengajar).

Sistem pembelajaran yang humanis akan menghilangkan dominasi guru. Dalam sistem pembelajaran ini, siswa diperlakukan berdasarkan hak dan kewajibannya sebagai subjek didik yang sedang membekali dirinya untuk menghadapi masa depannya secara kritis dan kreatif. Sistem pembelajaran ini menghindari proses dominasi yang cenderung membangun keseragaman dan menafikan keragaman. Oleh karena itu, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki keinginan dan karakteristik yang beragam. Proses pembelajaran memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengenal dan menangkap kehidupan senyatanya secara kritis dan kreatif. Pembelajaran seharusnya tidak direduksi menjadi usaha membuat penyeragaman pikiran, perasaan, maupun perilaku.

Kehumanisan sistem pembelajaran perlu direpresentasikan paling tidak dalam tiga hal, yakni dalam proses penyiapan bahan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan. Dalam pembelajaran yang humanis, bahan pembelajaran didasarkan kepada kebutuhan siswa (Heryanto, 2002), bukan semata-mata atas dasar asumsi para pakar, perancang kurikulum, atau guru. Hal ini selaras dengan perspektif konstruktivistik yang beranggapan bahwa pembelajaran akan efektif bila bahan pembelajaran yang dipilih terkait dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Keterkaitan itu membangkitkan skemata siswa terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari.

Proses pembelajaran yang humanis menempatkan guru sebagai mitra dialog sehingga pembelajaran bukan proses transfer, tetapi generatif. Menurut Slavin (2000), dalam proses pembelajaran, guru tidak dapat hanya memberikan pengetahuan. Guru harus membantu siswa agar informasi menjadi lebih bermakna dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerapkan informasi itu dalam dunia nyata. Guru dapat memberi tangga untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi, tetapi harus diupayakan siswa sendiri yang memanjat tangga tersebut. Dalam konteks ini, tampaknya strategi pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) merupakan pilihan yang tepat untuk membangun sistem pembelajaran yang humanis. Bentuk wacana dasar yang diperbincangkan guru dengan para siswa adalah bertanya (Postman, 2001:65). Guru dapat menggunakan pertanyaan konvergen (pertanyaan yang menghasilkan jawaban terpusat atau hanya satu jawaban) maupun pertanyaan divergen (pertanyaan yang

menghasilkan banyak jawaban). Kiranya bentuk pertanyaan divergen merupakan alat yang lebih penting, karena ada anggapan bahwa guru tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan sebagai alat untuk memancing para siswa agar membaca buku-buku pelajaran. Akan tetapi guru lebih melihat pertanyaan itu sebagai instrumen untuk menghadapi pikiran pada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Inilah pentingnya guru memposisikan dan menumbuhkan interaksi murid dengan murid sebagai kawan, bukannya interaksi antara guru dengan murid. Dalam konteks tertentu, guru juga perlu menghindari bertindak sebagai mediator ataupun sebagai hakim yang menilai kualitas dari gagasan-gagasan yang dinyatakan. Menjadi guru yang belajar dan murid yang mengajar, mengandaikan bahwa dalam proses interaksi dialogis antara guru dengan murid, keduanya merupakan subjek yang terlibat aktif dalam pembelajaran.

E. Penutup

Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai adanya keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Namun dalam kenyataannya, terdapat jarak dan kesenjangan antara guru dengan murid. Untuk itu, diperlukan adanya interaksi yang dialogis dalam proses pembelajaran di kelas.

Proses dialogis berfungsi memanusiakan peserta didik, karena memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih memberdayakan dirinya, dan juga mengharuskan pendidik untuk terus menerus belajar. Sistem pembelajaran yang dialogis dan humanis menghilangkan dominasi guru, karena siswa diperlakukan berdasarkan hak dan kewajibannya sebagai subjek didik. Sistem pembelajaran ini menghindari proses dominasi yang cenderung membangun keseragaman dan menafikan keragaman. Dialog juga merupakan jembatan yang dapat menghubungkan jarak antara guru dengan murid, sehingga dapat menghapus belenggu dominasi guru yang selama ini mewacana.

E. Daftar Pustaka

Forum Otonomi Pendidikan. 2003. *Siswa dan Komite Sekolah*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/01/dikbud/sisw09.htm>

- Heryanto, Nunu. 2002. *Pentingnya Landasan Filsafat Ilmu Pendidikan bagi Pendidikan : Suatu Tinjauan Filsafat Sains*. http://tumoutou.net/3_sem1_012/nunu_h.htm
- Jumadi . 2002. *Perlu Membangun Pembelajaran Humanis*. <http://unlamview.com/?p=6>.
- Kurniawan, Khaerudin. 2005. *Menata Kembali Lembaga Pendidikan Guru*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/02/0802.htm>
- Manshur, Faiz. 2003. *Pendidikan dan Ideologi Dominan*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0703/10/0802.htm>
- Morin, Edgar. 2005. *Tujuh Materi Penting bagi Dunia Pendidikan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Postman, Neil & Weingartner, Charles. *Mengajar sebagai Aktivitas Subversif*. Yogyakarta : Jendela Grafika.
- Shor, Ira & Freire, Paulo. 2001. *Menjadi Guru yang Merdeka, Petikan Pengalaman*. Yogyakarta : LkiS.
- Suparno, Paul SJ. et. al. 2002. *Reformasi Pendidikan : Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Vella, Jane. 2002. *Learning to Listen, Learning to Teach : The Power of Dialogue in Educating Adults*. San Fransisco : A Wiley Company.
- Wahono, Francis. 2002. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

